



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 08 September 2018

Halaman: 2

Pembahasan Raperda Disabilitas Terkendala Bongkar Ulang Materi

UMBUNHARJO (MERAPI) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan hak-hak disabilitas sampai kini masih terus dibahas di tingkat panitia khusus DPRD Kota Yogyakarta. Pembahasan materi raperda telah mencapai separuh dari total draf materi. Pembahasan dinilai tidak bisa cepat lantaran membongkar ulang materi raperda sebelumnya dan melibatkan Komite Disabilitas Kota Yogya.

"Pembahasan terakhir kemarin sudah sekitar lima puluh persen. Draf yang baru masih disusun teman-teman Komite Disabilitas. Kami membahasnya bertahap sesuai bab yang sudah selesai disusun," kata Ketua Pansus Raperda Disabilitas DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Fauzan, Jumat (7/9).

Meskipun penyusunan draf raperda belum selesai 100 persen, lanjut Fauzan, namun sebagian draf telah difasilitasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Surat hasil fasilitasi sebagian draf raperda disabilitas dari Kemenkumham, lanjutnya, juga telah diterima Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta.

Menurutnya, pembahasan raperda disabilitas tidak bisa cepat karena Komite Disabilitas juga tengah mendampingi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain itu materi raperda disabilitas juga dibongkar ulang sesuai rekomendasi dari Biro Hukum Pemda DIY karena materi sebelumnya dinilai hanya menyalin undang-undang terkait. "Tidak bisa cepat karena teman-teman yang di komite juga sedang mendampingi penyusunan RPP untuk UU disabilitas, sehingga harus bolak balik ke Jakarta," tambahnya.

Pihaknya menegaskan sudah mengakomodir keinginan para komunitas penyandang disabilitas untuk dilibatkan dalam pembahasan raperda disabilitas. Oleh sebab itu pansus melibatkan Komite Disabilitas Kota Yogya dalam rapat-rapat raperda. Terkait adanya tanggapan komunitas penyandang disabilitas yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan, dia meminta agar aktif berkomunikasi dengan Komite Disabilitas.

"Urudangan dari pansus kepada Komite Disabilitas karena menjadi wadah bagi komunitas-komunitas disabilitas yang ada," ujar Fauzan.

Seperti diketahui, Komite Disabilitas Kota Yogya adalah lembaga yang dibentuk secara resmi oleh Pemkot Yogya pada tahun 2017 melalui Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017. Anggota komite di antaranya organisasi penyandang disabilitas, unsur pemerintah, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat serta kamar dagang dan industri.

"Kami pengennya juga secepatnya diselesaikan pembahasannya dan disahkan. Rencananya Semin depan kami juga ada rapat pansus melanjutkan pembahasan," imbuhnya.

Seperti diketahui pada Kamis (6/9) berbagai elemen penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas menggelar aksi dan menagih raperda disabilitas yang tidak disahkan sejak masuk Propemperda tahun 2016. Koordinator Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas Arni Surwanti mendesak pansus DPRD Kota Yogyakarta untuk melaksanakan komitmen dan janjinya segera mempercepat pembahasan raperda secara terukur dan transparan dengan melibatkan penyandang disabilitas.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005